

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Jember, Desember 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jember



**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19770307 199612 1 001

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>7</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>8</b>
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	17
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>20</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	20
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	23
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	24
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang	27
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	36
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika	37
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	38
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	53
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	60
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>62</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	62
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	66
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	73

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	73
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	76
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	79
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	79
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	80
3.5 Penentuan isu-isu strategis	28
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>82</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	82
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>87</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>89</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>122</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>126</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	38
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	54
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	57
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	63
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	72
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	74
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	78
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	79
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	80
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	82
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	88
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	90

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD 122

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember	85
Gambar 4.2 Cascading	86

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan

Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Komunikasi dan Informatika harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember  
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 122).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan

isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distater recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten

Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik, terdiri atas
  - a. Seksi Statistik;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, di bidang Statistik, dan di bidang Persandian. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (4) sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.2.1 Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaiannya lainnya;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **2.1.2.2 Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan

- pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
  - f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
  - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik**

Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Jember serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;

- d. menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran informasi publik;
- e. menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Layanan Media Komunikasi Publik**

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapsitas sumber daya

- komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
  - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
  - e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan publikasi melalui media;
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
  - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan media komunikasi publik; dan

- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik**

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama Domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan

- suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

#### **2.1.5.1 Tugas Kepala Seksi Statistik**

Seksi Statistik mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, memproses dan melaksanakan semua kegiatan pengolahan data statistik serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang, pengolahan data statistik;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem kerja kegiatan bidang, pengolahan data statistik;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh OPD yang melaksanakan kewenangan daerah (sektoral);
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- f. Menyelenggarakan koordinasi statistik sektoral;
- g. Melakukan peningkatan kemampuan aparat (SDM) melalui bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi statistik sektoral;
- h. Mengumpulkan, mengelola, mengembangkan dan mengevaluasi data sehingga menjadi bank data daerah;
- i. Melakukan pembinaan dalam bidang peningkatan sumber daya pengelolaan data statistik;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait data statistik; dan
- k. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi**

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan infrastruktur jaringan intranet, internet dan infrastruktur telekomunikasi, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Jember, penyiapan, pengembangan dan pelayanan infrastruktur pelaksanaan smart city, merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola, mengamankan dan mengadakan infrastruktur teknologi informasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan, pendataan dan penataan tower dan frekwensi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

- layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;

### **2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat UPTD.

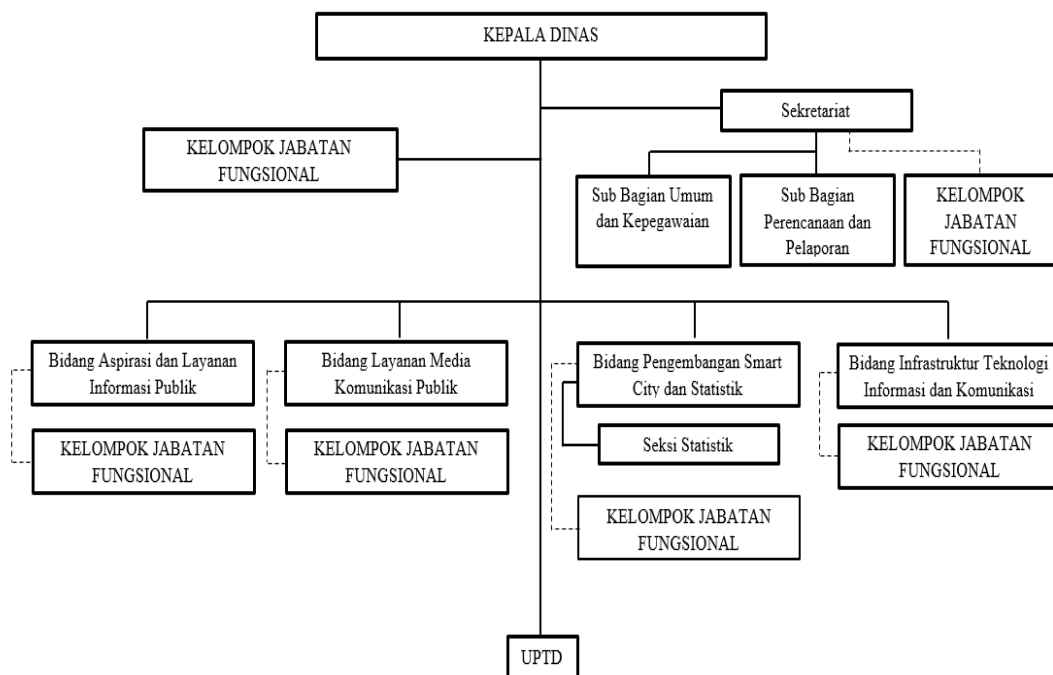
### **2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.
- d. Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- e. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub coordinator ditetapkan oleh Bupati.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya

merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai struktur organisasi terdiri dari pejabat struktural, pelaksana dan jabatan fungsional. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sampai dengan 1 Desember 2022 sebanyak 42 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 orang
2. Eselon III : 3 orang
3. Eselon IV : 11 orang
4. Pejabat fungsional : 3 orang
5. Staf/Non Eselon : 24 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 42 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 orang
2. Sarjana S-1 : 30 orang
3. Diploma -3 : 6 orang

4. SLTA : 3 orang

5. SLTP : 1 orang

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terselesaikan dengan baik. Namun tetap diperlukan peningkatan kompetensi khusus/keahlian khusus dengan mengikuti bimbingan teknis/workshop/pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kompetensi yang lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu tenaga pendukung di bidang administrasi / kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Meja Rapat	2	13.948.000	baik			
2	Lemari arsip	1	2.772.000	baik			
3	Perlengkapan Frontdesk	1	18.669.000	baik	1	18.669.000	Dialihkan ke aset BPKA

4	Handy Talky	1	14.112.000	baik			
5	Coffe dan Tea maker	1	27.380.100	baik			
6	Cangkir	6	1.980.000	baik			
7	Perlengkap an coffe maker	7	8.108.100	baik			
8	Bracket TV 55'	1	3.657.500	baik			
9	Karpet	1	5.998.300		1	5.998.300	Rusak
10	Kompor Gas	1	1.097.800	baik			
11	Meja Dapur	1	3.657.500	baik			
12	Lemari Kaca	2	4.389.000	baik			
13	Dispenser	1	2.922.150	baik			
14	Kulkas 1 pintu	1	2.560.800	baik			
15	Vacum Cleaner	1	5.120.500	baik			
16	Hand Vacum	1	988.350	baik			
17	Magic jar	1	1.540.000	baik			
18	Tempat sampah asbak stainless	5	5.489.000	baik			
19	Mangkok	2	737.000	baik			
20	Termos Pemanas	2	3.231.800	baik			
21	Box Kios	1	11.550.000	baik			
22	Mini PC	1	4.950.000	baik			
23	Monitor	1	66.000.000	baik			

24	G-Suite New	50	34.375.000	baik			
25	WinSrv2019Std	8	13.877.600	baik			
26	SQLSvrStd 2017	1	12.650.000	baik			
27	SQLSvrStd 2017 vcCal	1	3.047.000	baik			
28	Office Std 2019	1	6.050.000	baik			
29	GCP	1	2.816.000	baik			
30	Modem	2	2.106.000	baik			
31	Printer	6	14.892.000	Baik rusak dan	4	6.000.000	rusak
32	Proyektor	1	5.499.000	baik			
33	Layar Proyektor	1	8.775.000	baik			
34	Card Reader e-ktp	3	31.800.000	baik			
35	Peralatan Computing	1	39.200.000	baik			
36	Komputer	3	17.499.500	baik			
37	Mesin Absen	1	6.276.000	baik			
38	UPS	1	925.000	baik			
39	Sepeda Motor	4	57.392.000	baik			
40	Mini Bus	1	161.600.000	baik			
41	Televisi	2	10.095.000	baik			
42	Kipas Angin	1	2.070.000	baik			
43	Penghancur Kertas	2	3.520.000	baik			
44	AC	2	11.850.000	baik			

45	Handycam	1	18.360.000	baik			
46	Camera	1	22.500.000	baik			
47	Meja Pimpinan	2	5.750.000	baik			
48	Meja Kerja	8	10.560.000	baik			
49	Kursi Kerja	13	4.160.000	baik			
50	Kursi Pimpinan	2	5.466.936	baik			
51	Proyektor	1	9.800.000	baik			
52	Filling Cabinet	3	6.450.000	baik			
53	Meja Kerja	1	8.100.000	baik			
54	Televisi	1	2.850.000	baik			
55	Filling Kabinet	1	1.900.000	baik			
56	Kursi Staf	5	2.425.000	baik			
57	Lemari Arsip	2	3.190.000	baik			
58	Lemari Kaca	1	2.820.000	baik			
59	Meja dan Kursi Tamu	1	2.400.000	baik			
60	Meja Eselon IV	1	3.750.000	baik			
61	Meja Staff	8	14.000.000	baik			
62	Meja Staff	1	1.408.000	baik			
63	Umbul-umbul	1	2.920.000	baik			
64	Wireless TOA	1	24.500.000	baik			
65	Brankas	1	25.599.970	baik			
66	Mesin Fotocopy	2	35.133.600	baik			

67	Meja Pimpinan	1	12.000.000	baik			
68	Meja Sekretaris & Kabid	5	39.500.000	baik			
69	Kursi Pimpinan	1	3.750.000	baik			
70	Kursi Sekretaris & Kabid	5	13.250.000	baik			
71	Printer	1	4.557.990	baik			
72	Printer Laserjet	2	19.530.000	baik			
73	Scanner	1	10.000.000	baik			
74	Mesin Faximili	1	1.904.500	baik			
75	Camcoder/ Kamera Video	1	89.000.000	baik			
76	Penghancu r Kertas	2	9.020.020	baik			
77	AC Standing Floor	2	39.000.000	baik			
78	Server Blade	2	1.495.702.240	baik			
79	Blade Motherboard	8	1.456.313.544	baik			
80	Laptop	10	236.200.000	baik			
81	FusionSphere 6.x Software	1	1.271.704.461	baik			
82	Mainframe	1	34.529.260	baik			
83	San Switch	2	475.180.700	baik			
84	Mikrotik	1	10.554.300	baik			
85	UPS	2	798.463.400	baik			

86	Rak Storage	1	9.652.758	baik			
87	Storage	2	2.032.737.248	baik			
88	Lemari Arsip	3	10.125.000	baik			
89	Filling Kabinet	3	6.375.000	baik			
90	AC Unit	6	27.000.000	baik			
91	Drone	1	38.500.000	baik			
92	Komputer PC	5	49.000.000	baik			
93	Laptop	5	63.000.000	baik			
94	Komputer PC	2	44.794.660	baik			
95	Kamera Digital	2	48.173.340	baik			
96	Printer	1	4.557.990	baik			
97	Dispenser	2	6.600.000	baik			
98	Televisi	2	23.800.000	baik			
99	Kulkas 1 pintu	1	3.500.000	baik			
100	Pompa Air	2	1.400.000	baik			
101	Gordyn	1	9.700.000	baik			
102	Proyektor	1	26.500.000	baik			
103	Printer	1	2.804.250	baik			
104	Penjor	1	4.500.000	baik			
105	Lemari Kamera	2	38.500.000	baik			
106	AC Standing	2	53.000.000	baik			
107	Genset / CAT Generator	1	467.238.200	baik			

	Silent 200 KVA						
108	Komputer / PC	1	24.675.000	baik			
109	Recorder (CCTV)	1	3.160.000	baik			
110	Kamera Indoor (CCTV)	4	5.500.000	baik			
111	Kamera Outdoor (CCTV)	5	6.875.000	baik			
112	Hardisk (CCTV)	1	2.500.000	baik			
113	Monitor (CCTV)	1	1.250.000	baik			
114	1 Set Kabel UTP Cat 6e AMP	1	2.000.000	baik			
115	2 Unit Switch Hub POE	2	2.250.000	baik			
116	1 set Konektor RJ 45, Kabel Duk	1	2.912.000	baik			
117	Recorder (CCTV)	1	2.157.000	baik			
118	Kamera Indoor (CCTV)	4	5.500.000	baik			
119	Hardisk (CCTV)	1	2.500.000	baik			
120	Monitor 18,5" (CCTV)	1	1.250.000	baik			
121	1 Set Kabel UTP Cat 6e AMP	1	2.000.000	baik			

123	1 Unit Switch Hub POE	1	1.125.000	baik			
124	1 Set Konektor RJ 45, Kabel Duk	1	1.162.000	baik			
125	Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	1	75.000.000	baik			
126	Repeater Rembangan	1	99.425.000	baik			
127	Repeater Gunung Gending	1	99.822.500	baik			
128	Repeater Gunung Besek	1	99.822.500	baik			
129	Lampu Hias (Vidiotron)	1	199.600.000	baik			
130	Vidiotron (Alat Tambahan)	1	14.650.000	baik			
131	Soundcard	2	4.960.000	baik			
132	HDMI Video Capture	2	3.696.000	baik			
133	HDMI Splitter 1-4	1	621.500	baik			
134	HDMI Extender 60 M	2	1.270.000	baik			
135	Kabel LAN 100M	1	1.150.000	baik			
136	Soundcard	1	250.000	baik			
137	Audio dan Elektri	1	3.462.000	baik			

	Accessories						
138	N Webcam Group + Expansion Mic	1	27.500.000	baik			
139	Sony HXR-MC2500 Shouldermount AVCHD Camcorder	1	14.000.000	baik			
140	Tripod Attanta Vd2500 Profesional Video Maker Tripod Libec	1	2.500.000	baik			
141	Personal Computer	1	17.500.000	baik			
142	HDMI Splitter 1-4	1	621.500	baik			
143	HDMI Extender up to 60 M	1	635.000	baik			
144	HDMI Extender up to 150 M	2	2.580.000	baik			
145	Kabel LAN 150M	1	975.000	baik			
146	Kabel HDMI 30M	2	1.300.000	baik			
147	Audio dan Elektrik Accessories	1	6.651.000	baik			
148	Firewall, SSL, Routerboard	1	181.654.000	baik			

149	Storage	1	198.000.000	baik			
150	Lensa	1	24.340.000	baik			
151	Baterai Kamera	3	7.425.000	baik			
152	Memory Card	4	2.760.000	baik			
153	Flash	1	4.850.000	baik			
154	Router Mikrotik RB450	1	2.950.000	baik			
155	Router Mikrotik CCR1009	1	10.000.000	baik			
156	Access Point Ubiquity AC-LR	13	29.900.000	baik			
157	Router ROG Rapture	2	25.000.000	baik			
158	Router RT-AX56U	4	9.000.000	baik			
159	Kabel LAN Cat 6	6	11.520.000	baik			
160	Asus ROG Laptop	1	53.500.000	baik			
161	HP Envy Laptop	5	105.580.000	baik			
162	PC AIO Dell	3	84.900.000	baik			
163	Asus RT-AX56U	2	3.600.000	baik			
164	TP-Link	2	820.000	baik			
165	Printer Epson L4150	4	16.644.000	baik			
166	Kamera Sony	1	111.250.000	baik			

	XDCAM 4K PXW-Z280						
167	Tripod Benro	1	10.120.000	baik			
168	Tripod Camera 3520	1	285.000	baik			
169	EZCAP HD Capture	3	3.150.000	baik			
170	FWT 300pro+	2	16.000.000	baik			
171	HDTV Cable HDMI 10 Meter	4	660.000	baik			
172	HDTV Cable HDMI 25 Meter	4	1.660.000	baik			
173	HDTV Ceble HDMI 5 Meter	4	360.000	baik			
174	Flat HDMI To VGA Conventer	3	300.000	baik			
175	4K DP to HDMI Adapter	3	465.000	baik			
176	USB=C HUB Adapter HT390	6	2.430.000	baik			
177	HP Omen	1	19.525.000	baik			
178	Dell Poweredge T40	1	17.750.000	baik			
179	Dell EMC Power Vault	4	185.200.000	baik			

180	Micropack Adapter USB	4	7.014.800	baik			
181	Indoor IP Camera Dahua T184OP	1	1.203.000	baik			
182	Outdoor IP Camera Dahua T184OP	2	2.406.000	baik			
183	Link BGP	1	74.250.000	baik			
184	PC AIO HP	7	117.712.000	baik			
185	IP Transit	1	30.000.000	baik			
186	Logitech R800 Laser Pointer	2	3.094.000	baik			
187	Logitech Webcam with expansion mic	1	28.450.000	baik			
188	Laptop MSI	1	63.000.000	baik			
189	Monitor MSI	1	7.400.000	baik			
190	Headphone JBL	10	15.500.000	baik			
191	JBL Xtreme 2	1	3.850.000	baik			
192	TV Samsung	4	106.000.000	baik			
193	Logitech Webcam with expansion mic	4	113.800.000	baik			
194	PA AIO Dell	5	125.375.000	baik			
195	Flight Battery for	2	6.740.000	baik			

	Phantom 4 Pro						
196	Modul HDMI Drone	1	2.740.000	baik			
197	Belden Kabel LAN CAT-6	3	5.760.000	baik			
198	Konektor RJ45	5	1.990.000	baik			
199	Scanner Plustek	1	18.680.000	baik			
200	Genset MT-10000D	1	75.273.000	baik			
201	Dell San Switch	1	198.925.000	baik			
202	Altimeter	1	10.266.000	baik			
203	AVO Meter	1	3.510.000	baik			
204	Digital Lacer Meter	1	6.667.000	baik			
205	Optical Power Meter	1	2.242.000	baik			
206	Radiation Meter	1	4.395.000	baik			
207	Mesin Absen Finger Print	20	116.000.000	baik			
208	Lenovo AIO ThinkCentre M70a	100	2.388.400.000	baik			
209	Panasonic TH-65HX730G	100	1.598.656.100	baik			
210	Logitech Webcam	100	1.871.800.000	baik			

211	Epson L3110	100	287.400.000	baik			
212	Prolink VR2000D Stavolt	100	97.000.000	baik			
213	Viewsonic VB-STND-001 Bracket TV	100	800.000.000	baik			

Peralatan teknis yang kurang memadai yaitu Server, dikarenakan :

#### DATA KAPASITAS DAN PEMAKAIAN RESOURCE SERVER DISKOMINFO

Resource Server	Kapasitas 2021	Pemakaian 2021	Proyeksi Kebutuhan				
			2022	2023	2024	2025	2026
CPU (Core)	200	116	133	153	176	203	233
RAM (GB)	640	198	238	285	342	411	493
Storage (TB)	18	16	20	25	31	39	49
Backup Server	0	0	1	1	1	1	1

Proyeksi pertumbuhan pemakaian/penggunaan resource server tersebut menggunakan asumsi :

- CPU : 15% per tahun
- RAM : 20% per tahun
- Storage : 25% per tahun

Server yang dimiliki oleh Diskominfo Kab.Jember saat ini adalah **Huawei E9000 Blade** , dimana memiliki beberapa kekurangan, diantaranya :

1. Perangkat keras modul/spare part nya sudah tidak dijual lagi di pasaran.

Sumber : <https://support.huawei.com/enterprise/en/bulletins-product/ENEWS2000001612>

Milestone	Definition	Date
EOM	End of Marketing. The EOM date is the date from which the acceptance of the POs for new deployments and capacity expansions will be rejected. The product is not sold any longer after the date.	December 31,2018
EOS	End of Service and Support. After the EOS, Huawei does not provide software problem analysis services.	December 31,2023

Di samping masa garansi perangkat server yang telah berakhir pada bulan Januari 2021, tidak tersedianya modul/spare part server sangatlah riskan. Karena apabila terjadi kerusakan hardware, maka tidak akan dapat diganti, sehingga berpengaruh pada kapasitas dan kinerja server.

2. Dukungan terhadap teknologi software terbaru terbatas.

Statusnya yang sudah End Of Marketing dari vendor menyebabkan berhentinya pengembangan terhadap teknologi virtualisasi server itu sendiri. Sehingga server ini memiliki keterbatasan dukungan terhadap kernel Sistem Operasi.

Contoh : Versi Terakhir Sistem Operasi Linux yg didukung

- Debian 9
- Ubuntu 18.04
- Centos 7

3. Masih menggunakan teknologi server lama.

Arsitektur perangkat E9000 Blade Server memisahkan perangkat computing (Node) dengan perangkat penyimpanan (Storage). Oleh

karena itu membutuhkan perangkat SAN Switch untuk menghubungkan keduanya.

Hal tersebut memiliki kekurangan :

- Kecepatan akses data
- Konsumsi daya listrik besar
- Penempatan ruang kurang efisien
- Banyak perangkat yang harus di monitor dan dikelola

#### 4. Belum memiliki DRC (Disaster Recovery Center)

Server backup sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan layanan dan data.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																			
1	Website milik Pemerintah Daerah				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Media baru seperti website (media online)				Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	Ada/hari	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Persentase pembangunan system data yang terkoneksi berbasis IT				0	15	23	100	100	0	89	90	100	100	0	593	391	100	100
4	Persentase Desa/Kelurahan mempunyai web yang dapat diakses masyarakat				0	100	100	100	100	0	0	40	56	56	0	0	40	56	56
5	Persentase penyelesaian tahapan menuju				0	60	80	100	100	0	25	90	100	100	0	41,6	112,5	100	100

	Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan																		
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>																			
1.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2.	Buku "PDRB Kabupaten"				Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0	1	0	1	1	0	100	0	100	100
3.	Persentase dokumen data/informasi statistik daerah yang dihasilkan (%)				50	100	100	100	100	50	0	0	0	100	100	0	0	0	100
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>																			
1.	Persentase SKPD yang mengintegrasikan data dan persandian				-	-	30	55	65	-	-	20	30	30	-	-	66,66	60	46,15

Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika dari 5 indikator kinerja yang dapat dicapai sesuai dengan target sebanyak 4 indikator sedangkan indikator kinerja untuk persentase Desa/Kelurahan mempunyai web yang dapat diakses masyarakat belum mencapai target dikarenakan adanya pandemi diawal tahun 2020 tidak dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator tersebut.

Pencapaian kinerja urusan statistik dari 3 indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target karena Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember terkait dengan data-data statistik.

Pencapaian kinerja urusan persandian belum tercapai sesuai dengan target karena baru 2 OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pengamanan persandian pelayanannya. Data pada seluruh OPD belum terintegrasi tetapi penyimpanan data tersebut sudah menggunakan server yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Pembangunan Jember Satu Data;
- 2) Pengintegrasian aplikasi;
- 3) Pembuatan dan pengaktifan web desa/kelurahan;
- 4) Pengamanan persandian untuk pelayanan berupa tanda tangan elektronik

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	2.579.000.000	2.752.875.000	1.288.719.000	0	0	1.695.794.771	1.494.315.514	854.163.850	0	0	65,75	54,28	66,28	-23,22%	-27,35%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	132.000.000	225.500.000	140.850.000	0	0	26.790.159	53.614.950	56.962.800	0	0	20,29	23,77	40,44	16,64%	53,18%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	70.300.000	-	-	0	0	48.550.000	-	-	0	0	69,06	-	-	-50%	-50%
Program Pengembangan Komunikasi,	0	0	2.475.000.000	350.000.000	650.000.000	0	0	66.816.000	118.795.000	588.722.000	0	0	2,69	33,94	90,57	-0,06%	236,81%

Informasi dan Media Massa																	
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	0	0	1.087.475.000	471.500.000	241.450.000	0	0	77.128.498	-	199.800.000	0	0	7,09	-	82,75	-52,71%	0%
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	0	0	-	215.875.000	72.375.000	0	0	-	188.000.000	-	0	0	-	87,08	-	16,76%	0%
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0	0	-	94.000.000	5.474.000.000	0	0	-	-	5.101.991.500	0	0	-	-	93,2	2911,70%	50%
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	0	0	-	535.750.000	147.750.000	0	0	-	396.173.000	42.220.000	0	0	-	73,94	28,57	13,78%	5,32%
Program Pengembangan E-Government	0	0	2.503.260.000	2.656.400.000	3.465.000.000	0	0	2.054.029.672	2.264.587.544	2.967.008.004	0	0	82,05	77,32	85,62	18,27%	20,63
Program Pengembangan Pengolahan	0	0	-	61.500.000	50.000.000	0	0	-	31.800.000	-	0	0	-	51,7	-	40,65%	0%

**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2021-2026**

Data dan Persandian																	
Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis IT	0	0	28.500.000	31.000.000	45.450.000	0	0	16.175.000	16.500.000	-	0	0	56,75	53,22	-	27,69%	49%
Program Pengelolaan, Pengembangan Informasi dan Publikasi	0	0	28.790.000	181.500.000	192.100.000	0	0	18.450.000	119.827.500	100.250.000	0	0	64,08	66,02	52,18	268,13%	266,56%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Dokumentasi	0	0	-	90.000.000	590.000.000	0	0	-	39.200.000	174.597.500	0	0	-	43,55	29,59	327,77%	222,70%
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	0	0	-	172.500.000	70.000.000	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	20,28%	0%
JUMLAH	-	-	8.904.325.000	7.838.400.000	12.427.694.000	-	-	4.003.734.100	4.722.813.508	10.085.715.654							

Realisasi anggaran pada tahun 2020 mencapai 80%, program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2018 mencapai 44% dikarenakan pada tahun 2018 merupakan tahun awal Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum bisa optimal.

#### **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktor Interal

###### a. Kekuatan

- 1) Komitmen aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 2) Kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk beradaptasi terhadap tuntutan kebutuhan perkembangan komunikasi dan informatika

###### b. Kelemahan

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dengan latar belakang Komunikasi dan Informatika
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi elektronik e-government belum

sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat

- 3) Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
- 4) Fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
- 2) Penyediaan anggaran yang cukup setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 3) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public berbasis elektronik.

### b. Tantangan

- 1) Pengembangan TIK dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintah dan menuju Jember Satu Data
- 2) Pengembangan e-government
- 3) Peningkatan pembangunan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik
- 5) Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh OPD
- 6) Peningkatan kapasitas SDM

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum terwujudnya Jember Satu Data	Belum semua data terintegrasi ke dalam jember satu data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya tahapan yang diperlukan sehingga tidak dapat terealisasi secara langsung</li> <li>2. Ketersediaan SDM Tenaga IT OPD yang masih kurang</li> <li>3. Beberapa desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan belum terjangkau sarana dan prasarana komunikasi (blank spot)</li> </ol>
2	Belum terbukanya badan publik	Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik</li> <li>2. Masih kurangnya masyarakat yang melek informasi</li> </ol>
3	Adanya kesenjangan antara arus informasi dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Jember	Tidak semua masyarakat mampu mengakses berita informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial	Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Jember yang tidak merata

4	Belum adanya pengembangan kearifan lokal di Kabupaten Jember secara masif	Masih kurangnya sarana promosi kearifan lokal melalui media elektronik dan online	Masih kurangnya SDM Tenaga IT dan belum terorganisir para pelaku industri UMKM maupun wisata
5	Adanya tuntutan percepatan informasi dalam Pelayanan Publik	Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan e-government	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM OPD bidang IT baik secara kuantitas maupun kualitas</li> <li>2. Ketersediaan jaringan yang belum memadai, perangkat server sudah tersedia namun data center yang ada belum mencakup seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Jember</li> <li>3. Belum disusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang berupa regulasi, SOP maupun kajian</li> </ol>
6	Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik	Masih rendahnya pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya web site keterbukaan informasi publik/ PPID</li> <li>2. Kekurangan SDM tentang pengelolaan informasi publik</li> <li>3. Kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang informasi</li> </ol>

			<p>publik di masing-masing OPD</p> <p>4. Masih rendahnya pemahaman tentang pemahaman keterbukaan informasi publik oleh aparatur/ staf di lingkungan pemerintahan kabupaten jember</p>
7	Pengelolaan Kelompok informasi masyarakat belum maksimal	Banyaknya kelompok-kelompok informasi masyarakat yang belum memiliki legalitas	<p>1. Belum terdatanya secara resmi kelompok informasi masyarakat</p> <p>2. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok informasi</p> <p>3. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi kelompok informasi</p> <p>4. Terbatasnya sarana prasarana kelompok informasi</p>
8	Kurangnya kendali atas penyampaian informasi sehat kepada masyarakat	Banyaknya informasi hoax di masyarakat	<p>1. Masih minimnya sosialisasi penggunaan internet sehat</p> <p>2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang tergolong hoax</p> <p>3. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE</p>
9	Masih rendahnya indeks SPBE (Sistem	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan	Belum optimalnya peningkatan tata kelola dan ekosistem

	Pemerintahan Berbasis Elektronik)	internal SPBE masih belum optimal	e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
10	Belum optimalnya Pengelolaan aplikasi teknologi informasi	Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga programmer)	1.Kurangnya kerjasama dengan penyedia barang dan jasa di bidang teknologi informasi 2.Kurangnya pengadaan tenaga ahli Non PNS sebagai tenaga programmer
11	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi menjadi satu data	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan
12	Keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan data Pemerintah Daerah	Kurang kuatnya sistem keamanan data pada jaringan internet Pemerintah Daerah bisa menyebabkan bocornya dokumen yang menjadi rahasia negara	1.Belum adanya SDM (sandiman) yang bertanggung jawab terhadap keamanan data Pemerintah Daerah 2.Belum adanya bimbingan teknis/pelatihan untuk membentuk sandiman

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA  
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN  
JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah

menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara

sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

**Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

**Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien;

perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

**Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

**Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.**

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

**Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

**Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

**Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 3 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi</li> <li>- Kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk beradaptasi terhadap tuntutan kebutuhan perkembangan komunikasi dan informatika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dengan latar belakang Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</li> <li>- Fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai</li> </ul>

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga**

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dimana Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta focus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan focus utama yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi public. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenkominfo memetakan arah pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;

2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana table dibawah.

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Ketersediaan akses broadband masih belum merata	Banyaknya menara telekomunikasi yang dibangun oleh pihak ketiga	Kondisi wilayah yang sulit dijangkau
Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Layanan siaran digital belum menyeluruh	Di Jember terdapat 4 pemancar siaran digital	Struktur geografi Kab. Jember yang luas dan berbukit
Meningkatnya konektivitas layanan pos	Bukan kewenangan Pemerintah Daerah		
Terwujudnya konektivitas	Sarana prasarana telekomunikasi	Masyarakat Jember sudah	Belum ada provider yang

Next Generation Broadband Nasional	belum mampu mendukung koneksi Next Generation	menanti konektivitas Next Generation di Jember	mendukung koneksi 5G
Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Dinas Kominfo Kab. Jember tidak berwenang dalam kebijakan manajemen spektrum radio dan pita lebar	Banyak warga Jember yang memanfaatkan frekuensi radio dalam berkomunikasi	Struktur geografi Kab. Jember yang luas dan berbukit
Meningkatnya pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis	Belum banyak agenda yang memanfaatkan TIK dalam sector ekonomi dan bisnis	Pemkab Jember telah membuat aplikasi JKopi sebagai salah satu wadah untuk dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung ekonomi bisnis	Masyarakat Jember masih banyak yang memilih pasar tradisional dalam pemanfaatan ekonomi bisnis
Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Sarana / fasilitas layanan internet masyarakat belum menyeluruh	Masyarakat sangat antusias dengan layanan internet gratis di area publik	Kondisi wilayah yang sulit dijangkau

Dukungan implementasi digital pemerintah	Belum semua pelayanan di pemerintahan menggunakan secara elektronik	Anggaran pembuatan aplikasi untuk pelayanan di pemerintahan	Masih ada pegawai yang belum mampu mengoperasikan
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum maksimal penyampaian informasi	Telah adanya website PPID Perangkat Daerah dan PPID Desa	Kurangnya animo masyarakat terhadap informasi publik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum terintegrasinya seluruh pelayanan	Pemkab Jember telah membuat aplikasi JKopi sebagai salah satu wadah untuk pengintegrasian pelayanan	Masih ada Perangkat daerah yang belum mengintegrasikan aplikasinya

### **3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi**

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Mewujudkan transparansi akses data sectoral dan keamanan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik”, yang diukur dengan indikator “Indeks SPBE, Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu dan persentase informasi persandian yang diamankan”.

Sedangkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam transparansi, akses, interaktivitas public dan layanan infrastruktur di Jawa Timur
3. Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi
4. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistic yang terpercaya dan berkualitas.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/pengembangan komunikasi dan informatika serta peningkatan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam transparansi, akses, interaktivitas publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Belum terintegrasinya seluruh pelayanan	Pemkab Jember telah membuat aplikasi JKopi sebagai salah satu wadah untuk pengintegrasian pelayanan	Masih ada Perangkat daerah yang belum mengintegrasikan aplikasinya
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi	Belum optimal penggunaan keamanan informasi	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	Belum mempunyai tenaga Sandiman
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Belum maksimal pemanfaatan data statistik sektoral	Peraturan Bupati tentang Jember Satu Data	Belum optimal ketersediaan data statistik sektoral

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah **“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan dibidang statistik dan urusan pemerintahan dibidang persandian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW**

No .	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi	Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi	Kondisi fisik daerah yang banyak perbukitan dan pegunungan
2.	Pengembangan jaringan	Kebutuhan akan sinergi antar OPD	Belum adanya jaringan intra

	teknologi informatika	mutlak dibutuhkan adanya jaringan intra pemerintah yang menghubungkan data antar OPD	pemerintah yang menghubungkan antar OPD
--	-----------------------	--	---

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Tidak adanya kepemilikan sertifikat PPID	Adanya website PPID Perangkat Daerah dan PPID Desa	Belum ada diklat untuk pengelola PPID

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum mampu mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan baik.
2. Mewujudkan Jember Satu Data.
3. Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik.
4. Kurangnya pemahaman dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **Wes Wayahe Membenahi Jember dengan Berprinsip pada Kolaborasi, Sinergi dan Akselerasi dalam Membangun Jember.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Sebelum Perubahan</b>										
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan		Nilai Indeks SPBE	2,19	2,2					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Publik Berbasis Elektronik								
		Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks SPBE	2,19	2,2				
		Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	45,8	50				
		Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1				
<b>Setelah Perubahan</b>									
	Meningkatnya penyelenggaraan		Nilai Indeks SPBE			2,3	2,4	2,5	2,6

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik								
		Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE			2,4	2,5	2,6	2,7
		Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE			2,1	2,2	2,3	2,4
		Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE			1,5	1,8	2,1	2,4
		Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE			2,6	2,7	2,8	2,9



<b>TUJUAN</b>	<b>"MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK"</b>			
<b>INDIKATOR</b>	<b>Nilai Indeks SPBE</b>			
URUSAN	Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian			
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE</b>	<b>Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE</b>	<b>Meningkatkan penerapan manajemen SPBE</b>	<b>Meningkatkan kualitas layanan SPBE</b>
<b>INDIKATOR</b>	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai Indeks Domain tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE
				
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG PENGEMBANGAN SMART CITY DAN STATISTIK BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TIK BIDANG ASPIRASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>			

**Gambar 4.2 Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

VISI: Wes Wayahe Membenahi Jember dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, dan Akselerasi dalam Membangun Jember			
MISI I: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	1. Sasaran 1.1 Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	1. Strategi 1.1 Penguatan kebijakan tata kelola SPBE	1. Arah Kebijakan 1.1 Penyusunan arsitektur SPBE 2. Arah Kebijakan 1.2 Penyusunan Peta rencana SPBE
	1. Sasaran 1.2 Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	1. Strategi 1.1 Penguatan tata kelola SPBE	1. Arah Kebijakan 1.1 Penguatan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK 2. Arah kebijakan 1.2 Penguatan pusat data
	1. Sasaran 1.3 Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	1. Strategi 1.1 Monitoring dan Evaluasi Manajemen SPBE 2. Strategi 1.2 Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian	1. Arah Kebijakan 1.1 Penyusunan Laporan Manajemen SPBE 2. Arah Kebijakan 1.2 Melaksanakan Audit TIK
	1. Sasaran 1.4 Meningkatkan Kualitas Layanan SPBE	1. Strategi 1.1 Pembangunan Aplikasi SPBE	1. Arah Kebijakan 1.1 Peningkatan Integrasi Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan 2. Arah Kebijakan 1.2 Peningkatan Integrasi Aplikasi Layanan Publik

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sebelum Perubahan																					
Meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik				Nilai Indeks SPBE																	
	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE			Nilai Indeks SPBE																	
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik	100	100	11.602.094	100	12.436.647												

		2.1 6.02 .20 1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informatika di tingkat kecamatan	32,25	41.93	11.602.094	54,8	12.436.647											
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kajian bidang komunikasi dan informatika	-	3 kajian	782.000	3 kajian	821.129											
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah peserta serap opini dan aspirasi publik		675	186.553	675	195.859											
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah banner informasi agenda pemerintah daerah		1200	184.960	1200	194.208											
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumentasi kegiatan Pemkab		100	409.540	100	430.017											

			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita melalui media online	100	153.840	100	161.532											
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang diupload pada aplikasi PPID	70	194.820	17160	204.561											
			Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama dengan media massa, baik media cetak, elektronik maupun online	10	8.424.182	10	8.845.391											
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang dilatih bidang komunikasi dan Informasi	332	689.796	332	724.286											
			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase penyelesaian sengketa informasi	-	-	100	20.000											
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kermitrasan Komunitas	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan KIM	180	576.403	180	605.223											
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informa	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	-	-	4	234.441											

		si dan Komuni kasi Publik Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot a																	
	2.16 .03	Program Pengelol aan Aplikasi Informa tika	Persentase penggunaan aplikasi untuk pelayanan publik		100	32.827 .32 6	100	26.75 7.6 75											
	2.16 .03. 2.01	Kegiata n Pengelol aan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerin tah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot a	Persentase Domain dan Sub domain yang dikelola Pemerintah Daerah		15,8 8	22.418 .02 5	32, 71	1.6 30.85 5											
		Penatal aksanaa n dan Pengaw asan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyele nggaraa n Pemerin tahan Daerah Kabupa ten/Kot a	Jumlah domain dan sub domain yang ada di pemkab		51	-	105	50.48 0											

			Penyele nggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerin tah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan komputer mainframe		1	22. 418 .02 5	1	1.5 80. 37 5											
		2.16 .03. 2.02	Kegiatan Pengelol aan e- govern ment di Lingkup Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot a	Persentase pengembangan dan integrase teknologi informasi dan komunikasi	14,28	14,2 8	10. 409 .30 1	19, 48	25. 12 6.8 20											
			Penatal aksanaa n dan Pengaw asan e- govern ment dalam Penyele nggaraan Pemerin tahan Daerah Kabupa ten/Kot a	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit		-	-	1	10. 00 0											
			Pengelol aan Pusat Data Pemerin tahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan keamanan pada system aplikasi dan software		100	4.5 14. 051	100	19. 10 0.0 00											
			Penyele nggaraan Sistem Komuni kasi Intra Pemerin	Jumlah pengadaan sistem komunikasi		-	-	1	50. 00 0											

			tah Daerah																
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pengadaan dan pengembangan aplikasi	4	920.000	4	1.000.000											
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase smart city yang diimplikasikan	100	4.954.020	100	4.877.700											
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah peserta pengembangan dan pengelolaan TIK	180	21.230	180	49.120											
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi GCIO	-	-	70	20.000											
			Monitoring, Evaluasi dan	Jumlah kegiatan monev SPBE	-	-	4	20.000											

			Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																	
	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistic sectoral untuk perencanaan dan evaluasi	1,3	45,8		50												
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku kabupaten dalam angka	1	130	145.134	130	17.2.3.91											
		2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan analisa data statistik daerah			145.134		17.2.3.91											
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah publikasi data statistik sektoral dalam database		4	122.289	4	12.8.4.04											
			Peningkatan kapasitas SDM Pemerin	Jumlah peserta bimtek peningkatan mutu statistik		130	22.845	130	23.987											

			tah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	-	-	10	20.000											
	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	1,3	2,7	11,1												
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	50	100												
		2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan persandian dan pelaksanaan keamanan informasi		34	2.650.480	69	2.689.395										

		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan regulasi keamanan informasi dan jaringan komunikasandi	-	-	-	1	10.000											
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat-alat untuk pengolahan data/persandian	-	2	2.572.170	2	2.572.170											
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase pemeliharaan dan pengamanan terhadap hardware system informasi	-	100	78.310	100	82.225											

			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah email pemerintah daerah yang terpelihara	-	-	-	25	25.000											
		2.21.02.2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan keamanan informasi persandian	-	-	0	365	10.000											
			Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat, berita, informasi yang dikirim dan diterima melalui sarana persandian	-	-	0	365	10.000											
		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	100	8.994.622	100	10.196.391											
		2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		100	0	100	18.760											

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	0	2	2.680												
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	0	2	2.680												
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	2	2.680												
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	-	0	2	2.680												
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0	2	2.680												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	-	0	1	2.680												
			Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	-	0	4	2.680												

			at Daerah																	
		2.16 .01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	6.6 49. 185	100	6.9 87. 00 5											
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14	5.9 15. 245		6.2 11. 00 8											
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pemenuhan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12	733 .94 0		77 0.6 37											
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun		-	-		5.3 60											
		2.16 .01. 2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah				100	21. 44 0											
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah		-	-	2	5.3 60											

			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah analisa dan pengembangan retribusi daerah		-	-	1	5,360											
			Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Jumlah peserta penyuluhan kebijakan retribusi daerah		-	-	50	5,360											
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah		-	-	12	5,360											
		2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100	241,212											
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas		-	-	71	135,852											
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monev dan penilaian kinerja pegawai		-	-	4	5,360											

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	-	-	10	10 0.0 00											
		2.16 .01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100	683 .44 1	100	77 2.9 56											
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	71	28. 336	71	20. 00 0											
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	28	409 .75 7	20	40 0.0 00											
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	22	3.4 57	15	5.0 00											
			Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah bulan pemenuhan penyediaan bahan logistik	12	17. 540	12	10 0.0 00											
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6	6.3 95	6	30. 00 0											

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pemenuhan penyediaan langganan surat kabar dan majalah	12	217.956	12	217.956												
		2.16.01.2.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	1.333.406	100	1.333.406												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan materai dan pengiriman surat	300	10.000	750	20.000												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan pembayaran langganan telisa	12	244.945	12	240.000												
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	37	36.171	35	50.000												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan umum kantor	12	1.042.290	12	1.500.000												
		2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan	100	328.590	100	345.018												

		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		1	38.736	1	40.672											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		6	62.298	6	65.413											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara		1	227.556	1	238.933											

Setelah Perubahan																		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik				Nilai Indeks SPBE	2,18					2,3		2,4		2,5		2,6		2,6
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE				Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE					2,4		2,5		2,6		2,7		2,7	
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE				Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE					2,1		2,2		2,3		2,4		2,4	
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE				Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE					1,5		1,8		2,1		2,4		2,4	
Meningkatkan kualitas				Nilai Indeks Domain Layanan SPBE					2,6		2,7		2,8		2,9		2,9	

layanan SPBE																				
		X.X X.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD					100		100		100		100		100			
		X.X X.0 1.20 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja diskominfo				100	19.698	100	20.678	100	21.714	100	22.799	100		Sekretariat	Diskominfo	
		X.X X.0 1.20 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	2.814	2	2.954	2	3.102	2	3.257	2				
		X.X X.0 1.20 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	2.814	1	2.954	1	3.102	1	3.257	1				
		X.X X.0 1.20 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	2.814	1	2.954	1	3.102	1	3.257	1				

		X.X X.0 1.20 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	2.814	1	2.954	1	3.102	1	3.257	1			
		X.X X.0 1.20 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	2.814	1	2.954	1	3.102	1	3.257	1			
		X.X X.0 1.20 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6	2.814	6	2.954	6	3.102	6	3.257	6			
		X.X X.0 1.20 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	2.814	4	2.954	4	3.102	4	3.257	4			
		X.X X.0 1.20 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan diskominfo					100	7.336.354	100	7.703.174	100	8.088.330	100	8.492.748	100		Sekretariat	Diskominfo
		X.X X.0 1.20 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					26	6.521.558	26	6.847.638	26	7.190.018	26	7.549.519	26			
		X.X X.0 1.20 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	809.168	12	849.627	12	892.108	12	936.714	12			
		X.X X.0	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan					1	5.628	1	5.909	1	6.204	1	6.515	1			

		1.20 2.05	uan Laporan Keuang an Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
		X.X X.0 1.20 4	Adminis trasi Pendap atan Daerah Kewena ngan Perangk at Daerah	Persentase penuhan administrasi pendapatan daerah pada diskominfo				100	22. 512	100	23.6 36	100	24.81 6	100	26. 060	100			Sekretari at	Diskominfo
		X.X X.0 1.20 4.01	Perenca naan Pengelol aan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1	5.6 28	1	5.90 9	1	6.204	1	6.5 15	1				
		X.X X.0 1.20 4.02	Analisa dan Pengem bangan Retribusi Daerah, serta Penyus unan Kebijak an Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1	5.6 28	1	5.90 9	1	6.204	1	6.5 15	1				
		X.X X.0 1.20 4.03	Penyulu han dan Penyeba ruasan Kebijak an Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarnya n Kebijakan Retribusi Daerah				1	5.6 28	1	5.90 9	1	6.204	1	6.5 15	1				
		X.X X.0 1.20 4.07	Pelapor an Pengelol aan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12	5.6 28	12	5.90 9	12	6.204	12	6.5 15	12				

		X.X X.0 1.20 5	Adminis- trasi Kepega- waan Perangk- at Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian diskominfo					100	253 .27 3	100	265. 936	100	279.2 32	100	293 .19 4	100		Sekretari- at	Diskominfo
		X.X X.0 1.20 5.02	Pengada- an Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap- annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					5	142 .64 5	5	149. 777	5	157.2 66	5	165 .12 9	5			
		X.X X.0 1.20 5.05	Monitori- ng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4	5.6 28	4	5.90 9	4	6.204	4	6.5 15	4			
		X.X X.0 1.20 5.09	Pendidi- kan dan Pelatih- an Pegawai Berdasa- rkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					3	105 .00 0	3	110. 250	3	115.7 62	3	121 .55 0	3			
		X.X X.0 1.20 6	Adminis- trasi Umum Perangk- at Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum diskominfo					100	811 .60 3	100	852. 183	100	894.7 91	100	939 .53 0	100		Sekretari- at	Diskominfo
		X.X X.0 1.20 6.01	Penyedi- aan Kompon- en Instalasi Listrik/ Peneran- gan Bangun- an Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga- n Bangunan Kantor yang Disediakan					1	21. 000	1	22.0 50	1	23.15 2	1	24. 310	1			
		X.X X.0 1.20 6.02	Penyedi- aan Peralata- n dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan					6	420 .00 0	6	441. 000	6	463.0 50	6	486 .20 2	6			

			Perengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan																
		X.X X.0 1.20 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	5.250	2	5.512	2	5.788	2	6.077	2			
		X.X X.0 1.20 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					9	105.000	9	110.250	9	115.762	9	121.550	9			
		X.X X.0 1.20 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	31.500	1	33.075	1	34.728	1	36.465	1			
		X.X X.0 1.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12	228.853	12	240.296	12	252.311	12	264.926	12			
		X.X X.0 1.20 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang pada diskominfo					100	1.900.500	100	1.995.525	100	2.095.300	100	2.200.065	100		Sekretariat	Diskominfo
		X.X X.0 1.20 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	21.000	12	22.050	12	23.152	12	24.310	12			
		X.X X.0 1.20 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	252.000	12	264.600	12	277.830	12	291.721	12			

			Air dan Listrik																	
		X.X X.0 1.20 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10	52.500	10	55.125	10	57.881	10	60.775	10			
		X.X X.0 1.20 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	1.575.000	12	1.653.750	12	1.736.437	12	1.823.259	12			
		X.X X.0 1.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah pada diskominfo					100	165.684	100	174.118	100	182.724	100	191.510	100		Sekretariat	Diskominfo
		X.X X.0 1.20 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1	60.000	1	65.000	1	70.000	1	75.000	1			
		X.X X.0 1.20 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12	68.684	12	72.118	12	75.724	12	79.510	12			

			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		X.X X.0 1.20 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21	20.000	21	20.000	21	20.000	21	20.000	21			
		X.X X.0 1.20 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	1				
		2.16 .02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			54,80		54,80		54,80		54,80		54,80				
		2.16 .02 201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			100	1.161.087	100	1.219.142	100	782.302	100	821.416	100				
		2.16 .02 201.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			5	300.000	2	315.000	2	330.750	2	347.287	2		Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik	Diskominfo	

			kasi Publik																	
		2.16.02.201.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					8	205.652	12	215.935	12	226.732	12	238.068	12		Bidang Aspirasi dan Informasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah					12	203.918	12	214.114	12	224.820	12	236.061	12		Bidang Aspirasi dan Informasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					45	451.517	45	474.093	45	497.798	45	522.688	45		Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					1460	169.608	1460	178.089	1460	186.993	1460	196.343	1460		Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					8	214.789	12	225.528	12	236.804	12	248.645	12		Bidang Aspirasi dan Informasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media					88	9.287.661	100	9.752.044	100	10.239.646	100	10.751.628	100		Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya					50	760.500	50	798.525	50	838.451	50	880.374	50		Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik	Diskominfo

			kasi Publik																	
		2.16.02.201.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1	21.000	1	22.050	1	23.152	1	24.310	1			Bidang Aspirasi dan Informasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				10	635.484	10	667.258	10	700.621	10	735.652	10			Bidang Aspirasi dan Informasi Publik	Diskominfo
		2.16.02.201.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				31	246.163	10	258.471	10	271.394	10	284.964	10			Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi				92,00		92,00		92,00		92,00		92,00				
		2.16.03.201	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan				66	1.712.397	70	1.798.017	75	1.887.918	80	1.982.314	80				

			oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara															
		2.16.03.201.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				15	53.004	12	55.654	12	58.436	12	61.358	12		Bidang Infrastruktur TIK	Diskominfo
		2.16.03.201.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			3	1.659.393	4	1.742.363	4	1.829.481	4	1.920.955	4		Bidang Infrastruktur TIK	Diskominfo	
		2.16.03.202	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah			50	26.383.161	75	27.702.319	85	29.087.435	100	30.541.806	100				
		2.16.03.202.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government			1	10.500	1	11.025	1	11.576	1	12.155	1		Bidang Pengembangan Smart	Diskominfo	

			govern ment dalam Penyele nggaraan n Pemerin tahan Daerah Kabupa ten/Kota a	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															City dan Statistik	
		2.16 .03. 202. 03	Pengelol aan Pusat Data Pemerin tahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola					1	20. 055 .00 0	1	21.0 57.7 50	1	22.11 0.637	1	23. 216 .16 9	1		Bidang Infrastrur ktur TIK	Diskominfo
		2.16 .03. 202. 04	Penyele nggaraan n Sistem Komuni kasi Intra Pemerin tah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					4	52. 500	4	55.1 25	4	57.88 1	4	60. 775	4		Bidang Infrastrur ktur TIK	Diskominfo
		2.16 .03. 202. 07	Pengemb angan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerin tahan Berbasis Elektro nik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					4	1.0 50. 000	4	1.10 2.50 0	4	1.157 .625	4	1.2 15. 506	4		Bidang Pengemb angan Smart City dan Statistik	Diskominfo
		2.16 .03. 202. 09	Pengemb angan dan Pengelol aan Ekosiste m Kabupa ten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasika n Sesuai dengan Masterplan Smart City					10	5.1 21. 585	10	5.37 7.66 4	10	5.646 .547	10	5.9 28. 874	10		Bidang Pengemb angan Smart City dan Statistik	Diskominfo

		2.16 .03. 202. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					4	51.576	4	54.154	4	56.862	4	59.705	4		Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Diskominfo
		2.16 .03. 202. 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					12	21.000	12	22.050	12	23.152	12	24.310	12		Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Diskominfo
		2.16 .03. 202. 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE					1	21.000	1	22.050	1	23.152	1	24.310	1		Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Diskominfo
		2.20 .02	PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku Kabupaten Dalam Angka					130	178.500	130	187.400	130	196.700	130	206.600	130			
		2.20 .02. 201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan					4	181.010	4	190.061	4	199.564	4	209.542	4			

		2.20.02.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					1	134.824	1	141.565	1	148.643	1	156.075	1		Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Diskominfo
		2.20.02.201.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				400	25.186	200	26.445	200	27.768	200	29.156	200			Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Diskominfo
		2.20.02.201.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1	21.000	1	22.050	1	23.152	1	24.310	1			Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Diskominfo
		2.21.02	PROGRAM PENYELANGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAAMANAN INFORMASI	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah				100	1.098.300	100	1.153.200	100	1.210.800	100	1.271.400	100				
		2.21.02.201	Penyelesaian Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal				100	373.087	100	429.241	100	335.703	100	392.488	100				

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		2.21.02.201.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					5	10.500	1	11.025	1	11.576	1	12.155	1		Bidang Infrastruktur TIK	Diskominfo
		2.21.02.201.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					6	250.000	6	300.000	6	200.000	6	250.000	6		Bidang Infrastruktur TIK	Diskominfo
		2.21.02.201.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					2	86.337	2	90.654	2	95.186	2	99.946	2		Bidang Infrastruktur TIK	Diskominfo

			nik dan Non Elektronik																	
		2.21.02.201.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10	26.250	20	27.562	40	28.940	69	30.387	69			Bidang Infrastruktur TIK	Diskominfo
		2.21.02.202	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan				100	19.698	100	20.682	100	21.717	100	22.802	100				
		2.21.02.201.01	Operasi Analisis Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				8	10.500	8	11.025	8	11.576	8	12.155	8			Bidang Infrastruktur TIK	Diskominfo

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026
Sebelum Perubahan									
1	Nilai Indeks SPBE	2,18	2,19	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	1,38	45,8	50	54,1	58,3	62,5	66,6	66,6
3	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,11	11,11	25	69,44	83,3	100	100
Setelah Perubahan									

1	Nilai Indeks SPBE	2,18	2,19	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
2	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE				2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
3	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE				2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
4	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE				1,5	1,8	2,1	2,4	2,4
5	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE				2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
6	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	32,35	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
7	Cakupan Layanan Telekomunikasi	90	92	92	92	92	92	92	92
8	Buku Kabupaten dalam angka	1	130	130	130	130	130	130	130
9	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	0	100	100	100	100	100	100	100

	dalam komunikasi perangkat daerah								
10	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	100	100	75	75	75	75	75
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	66,6	75	80	85	90	95	95
12	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	-	13,19	15	17	20	23	25	25

13	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	-	125/ 645	150/ 645	175/ 645	200/ 645	225/ 645	250/ 645	250/645
14	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga

memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, Desember 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jember



**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19770307 199612 1 001